

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

*Corporate Governance* merupakan bagian sangat penting pada perusahaan publik. Pengertian *Corporate Governance* menurut Indonesia / FCGI (2001b) yang dikutip dari jurnal Herman Darwis (2009:420), mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Peraturan mengenai pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan perseroan, diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

Perusahaan perbankan wajib menerapkan *corporate governance* di perusahaannya. Hal ini merujuk pada peraturan Bank Indonesia No. 8/PBI/2000 pasal 2 butir pertama, mengenai kewajiban perusahaan perbankan melaksanakan *corporate governance* di perusahaannya. Berdasarkan penelitian Waleed M. Al Ahdal et al.,2019, *corporate governance* pada perusahaan dapat diproksikan dalam 3 hal. Yaitu *Board Accountability, Transparency and Disclosure*, dan *Audit Committee*.

Dewan direksi merupakan bagan yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari perusahaan perseroan. Hal ini merujuk pada pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dewan direksi adalah satu satunya organ perseroan yang sudah ditunjuk oleh undang-undang dan perusahaan, untuk bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan menjalankan operasional perusahaan.

Transparansi merupakan bagian sangat penting pada perusahaan perseroan, khususnya perbankan. Berdasarkan UU No.40 tahun 2007, mengatur transparansi sebagai salah satu prinsip *corporate governance*. Komite audit merupakan bagian sangat penting dalam perusahaan perseroan. Hal ini merujuk pada POJK Nomor 55 /POJK.04/2015 pasal 2 yang berbunyi “emiten atau perusahaan Publik wajib memiliki komite audit”. Dan Berdasarkan SE Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-03/PM/2000, yang menjelaskan mengenai rekomendasi pembentukan Komite Audit untuk perusahaan Perseroan.

Terdapat beberapa kasus berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan yang bermasalah, seperti Pada tahun 1992 masyarakat industri otomotif Jepang mengkritik industri otomotif Amerika Serikat yang memberikan gaji terlalu tinggi pada eksekutifnya. Bahkan ketika terjadi resesi pada tahun 1989, gaji mereka terus meningkat sebesar rata-rata 6.7% sedangkan nilai para pemegang saham merosot sebesar 9%. Untuk itu, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Sehingga *Coorporate Governance* memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.

Perlu diketahui tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012:31) yaitu: Pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi.

Ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Dan yang Keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya. Dan yang kelima untuk Usahanya dengan stabil dan mempertimbangkan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Oleh karena adanya latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian sbb. : *PENGARUH BOARD ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY DAN DISCLOSURE, DAN AUDIT COMMITTEE TERHADAP KINERJA KEUANGAN* (Penelitian pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Board Accountability* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
2. Apakah *Transparency and Disclosure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Audit Committee* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Board Accountability* terhadap Kinerja Keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Transparency and disclosure* terhadap Kinerja Keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Committee* terhadap Kinerja Keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
  - a) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pentingnya pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan publik, khususnya sektor perbankan.
  - b) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi akan memberikan sedikit gambaran tentang pengaruh dewan direksi, komite audit, dan transparansi terhadap kinerja keuangan.
2. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai pentingnya pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan publik, khususnya sektor perbankan di Indonesia.
  - b) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau informasi calon peneliti yang tertarik dengan kajian yang sama di masa mendatang.

### E. Sistematika Penulisan Skripsi

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian ini adalah Jenis Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel, Metode Pengumpulan Data, Desain Pengambilan Sampel, Metode Analisis Data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

### BAB V : PENUTUP

Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN